

LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN ANTARA ETIKA PROFESI AKUNTANSI DAN KASUS KORUPSI

Nurliza Lubis, S.E., M.Si¹., Amelia Br Silitonga², Sheilla Andini Agustin Lubis³, Pitri Ayuwardani⁴, Rika Arnika⁵, Siti Nazira⁶, Tika Dara Astuti⁷, Widia Fitaloka⁸, Muamar Afif Mutaqin⁹

Jurusan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Samudra

Email : ameliasilitonga1@gmail.com

ABSTRAK

Literature review ini membahas tentang hubungan antara etika profesi akuntansi dan praktik korupsi, serta efektivitas regulasi dan pengawasan dalam memitigasi korupsi di sektor bisnis dan pemerintahan. Melalui analisis dan sintesis terhadap literatur terkini, kajian ini mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap praktik korupsi dalam akuntansi, mengeksplorasi prinsip-prinsip etika bisnis yang seringkali dilanggar, dan mengevaluasi upaya pencegahan serta peran lembaga pengawas. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan multi-dimensi yang melibatkan penguatan nilai etika individu, reformasi budaya organisasi, penegakan regulasi, dan peningkatan transparansi merupakan strategi efektif dalam menekan praktik korupsi di bidang akuntansi. Literature review ini memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka kerja anti-korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Akuntansi, Korupsi, Tata Kelola Perusahaan, Whistleblowing, Integritas Profesional

ABSTRACT

This literature review examines the relationship between accounting professional ethics and corrupt practices, as well as the effectiveness of regulation and supervision in mitigating corruption in the business and government sectors. Through analysis and synthesis of current literature, this study identifies various internal and external factors that contribute to corrupt practices in accounting, explores the principles of business ethics that are often violated, and evaluates prevention efforts and the role of supervisory institutions. The results of the study indicate that a multi-dimensional approach involving strengthening individual ethical values, reforming organizational culture, enforcing regulations, and increasing transparency is an effective strategy in suppressing corrupt practices in accounting. This literature review provides insights for academics,

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

practitioners, and policy makers in developing a comprehensive and sustainable anti-corruption framework.

Keywords: *Accounting Ethics, Corruption, Corporate Governance, Whistleblowing, Professional Integrity*

PENDAHULUAN

Profesi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas informasi keuangan dan memastikan transparansi dalam praktik bisnis dan pemerintahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai skandal akuntansi dan kasus korupsi yang melibatkan profesional akuntansi telah mengguncang kepercayaan publik (Mulyani & Safitri, 2021). Di Indonesia dan berbagai negara lainnya, korupsi masih menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat (Nugroho & Waridin, 2021). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kerangka etika profesional dan sistem pengawasan yang ada.

Etika profesi akuntansi menjadi landasan penting dalam pencegahan praktik korupsi. Literature review ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian terkini mengenai korupsi dalam akuntansi, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) faktor-faktor penyebab korupsi, baik internal maupun eksternal; (2) prinsip etika bisnis yang dilanggar dalam praktik korupsi; dan (3) upaya pencegahan serta peran lembaga pengawas dalam memitigasi risiko korupsi.

Dalam konteks global yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan transformasi digital, memahami dinamika korupsi dalam akuntansi menjadi semakin penting. Terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana korupsi masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial (Prabowo et al., 2022). Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademis tetapi juga relevansi praktis bagi upaya pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Literature review ini menggunakan pendekatan sistematis dalam pengumpulan dan analisis literatur. Pencarian literatur dilakukan pada database akademik terkemuka seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, JSTOR, dan Google Scholar, dengan kata kunci yang mencakup: "*accounting ethics*," "*corruption in accounting*," "*professional ethics accountant*," "*ethical dilemmas accounting*," "*whistleblowing accounting*," "*corporate governance corruption*," dan "*ethical decision making accountant*."

Dari hasil pencarian awal, diperoleh lebih dari 150 artikel. Setelah melalui proses screening berdasarkan judul dan abstrak, 50 artikel diidentifikasi sebagai potensial relevan. Setelah evaluasi teks lengkap, 10 artikel dipilih untuk dimasukkan dalam literature review ini berdasarkan kualitas metodologi, relevansi, dan kontribusi terhadap topik kajian.

Analisis literatur dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membangun kerangka konseptual, dan melakukan sintesis naratif untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian. Pendekatan meta-sintesis interpretatif juga diterapkan untuk mengeksplorasi pola-pola dan tren yang muncul dari literatur karena perusahaan yang telah

terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Korupsi dalam Akuntansi

3.1.1 Faktor Internal

Beberapa penelitian terkini mengidentifikasi faktor-faktor internal yang berkontribusi terhadap perilaku koruptif di kalangan akuntan. Suryanto dan Thalassinos (2020) mengungkapkan bahwa karakteristik individu seperti rendahnya level penalaran moral, kecenderungan narsistik, dan rasionalisasi etis berkorelasi positif dengan kecenderungan untuk terlibat dalam praktik akuntansi yang tidak etis. Studi yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2021) terhadap 315 akuntan profesional menemukan bahwa tekanan finansial personal dan persepsi tentang ketidakadilan remunerasi sering menjadi justifikasi bagi perilaku tidak etis.

Selain faktor psikologis, defisiensi dalam pendidikan etika akuntansi juga berkontribusi terhadap problem etis di masa depan. Gómez-Villegas et al. (2022) melalui analisis kurikulum akuntansi di 20 universitas terkemuka menemukan bahwa pembelajaran etika seringkali bersifat superfisial dan gagal mengembangkan kapasitas mahasiswa untuk menghadapi dilema etis kompleks dalam praktik profesional. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal dari Ibrahim dan Kamil (2023) yang menunjukkan bahwa lulusan akuntansi dengan eksposur minimal terhadap pendidikan etika menunjukkan sensitivitas etis yang lebih rendah ketika menghadapi situasi ambigu.

Orientasi nilai pribadi juga menjadi determinan penting. Cahyono dan Loen (2021) menemukan bahwa akuntan dengan orientasi nilai materialistik dan individualistik lebih cenderung mengkompromikan standar etis dibandingkan mereka yang memiliki orientasi nilai komunal dan altruistik. Penemuan ini menunjukkan pentingnya seleksi berbasis nilai dalam rekrutmen profesional akuntansi.

3.1.2 Faktor Eksternal

Di sisi eksternal, beberapa variabel organisasi dan struktural telah diidentifikasi sebagai katalis praktik koruptif. Budaya organisasi yang menekankan pencapaian target keuangan jangka pendek dengan mengorbankan integritas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelanggaran etis. Penelitian Prabowo et al. (2022) terhadap 18 kasus fraud akuntansi di Indonesia mengungkapkan bahwa tekanan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder dan kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari pelaporan kinerja yang jujur namun mengecewakan mendorong manipulasi data keuangan.

Studi komparatif oleh Wang et al. (2020) di lima negara Asia mengidentifikasi konteks institusional sebagai faktor determinan. Negara-negara dengan sistem hukum yang lemah, penegakan regulasi yang tidak konsisten, dan budaya toleransi terhadap korupsi menunjukkan insiden pelanggaran etika akuntansi yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya memahami korupsi dalam akuntansi sebagai fenomena sosio-kultural yang dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat dan kerangka institusional.

Digitalisasi sistem akuntansi menciptakan bentuk-bentuk baru kerentanan etis. Kumar dan Yadav (2023) mengeksplorasi bagaimana transformasi digital menciptakan "zona abu-abu" etis yang belum sepenuhnya diatur oleh kode etik konvensional. Anonimitas dalam transaksi digital, kompleksitas algoritma, dan cybersecurity menjadi dimensi baru yang memerlukan rekonseptualisasi etika akuntansi di era digital.

Dalam perspektif makro, Nguyen dan Le (2021) mengidentifikasi ketimpangan ekonomi, instabilitas politik, dan ketidakpastian kebijakan sebagai faktor struktural yang meningkatkan insentif untuk perilaku koruptif di kalangan profesional akuntansi. Dalam kondisi ketidakpastian tinggi, praktik akuntansi agresif atau bahkan manipulatif menjadi strategi adaptif bagi organisasi untuk menghadapi tekanan lingkungan.

3.2 Prinsip Etika Bisnis yang Dilanggar dalam Kasus Korupsi

Literature terkini menunjukkan bahwa korupsi dalam akuntansi melibatkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip etika bisnis fundamental. Syahrul et al. (2020) mengidentifikasi empat prinsip utama yang seringkali dilanggar: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Melalui analisis 25 kasus pelanggaran etika akuntansi, mereka menemukan bahwa 78% kasus melibatkan kompromi terhadap prinsip integritas, sementara 65% melibatkan pelanggaran terhadap objektivitas.

Integritas profesional, sebagai prinsip yang mewajibkan akuntan untuk bersikap jujur dan terus terang dalam semua hubungan profesional, seringkali tererosi melalui proses gradual. Ibrahim dan Kamil (2023) menjelaskan fenomena "slippery slope" di mana pelanggaran kecil yang tidak ditangani menciptakan preseden dan menormalkan perilaku tidak etis yang lebih serius. Normalisasi deviasi ini dikontribusikan oleh ambiguitas moral, tekanan peer, dan rasionalisasi kognitif.

Objektivitas, yang mengharuskan akuntan untuk tidak mengompromikan penilaian profesional karena bias atau konflik kepentingan, juga sering dikompromikan. Gómez-Villegas et al. (2022) mengidentifikasi mekanisme psikologis seperti "motivated reasoning" dan "self-serving bias" yang mengancam objektivitas akuntan, terutama dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau organisasi berbenturan dengan standar etis. Fenomena ini diperparah oleh ketidakjelasan batas antara konsultasi strategis dan audit independen.

Prinsip kerahasiaan juga menghadapi tantangan kompleks. Di satu sisi, kerahasiaan klien harus dijaga; di sisi lain, transparansi diperlukan untuk mengungkap praktik ilegal. Ahmad et al. (2021) meneliti dilema whistleblowing dalam konteks ini, menemukan bahwa 67% akuntan mengalami konflik moral ketika menghadapi pilihan antara menjaga kerahasiaan klien atau melaporkan ketidakpatuhan. Studi ini menyoroti pentingnya protokol whistleblowing yang jelas dan perlindungan memadai bagi whistleblower.

Perilaku profesional yang mewajibkan akuntan untuk mematuhi hukum dan regulasi juga seringkali dikompromikan melalui eksploitasi celah peraturan. Kumar dan Yadav (2023) mengidentifikasi praktik "creative accounting" yang memanfaatkan ambiguitas atau ketidaklengkapan standar akuntansi untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa secara teknis melanggar hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap "huruf" hukum tidak selalu menjamin kepatuhan terhadap "semangat" etika profesional.

3.3 Upaya Pencegahan dan Peran Lembaga Pengawas

Dalam memitigasi risiko korupsi dalam akuntansi, penelitian terkini mengidentifikasi sejumlah strategi efektif dan peran krusial lembaga pengawas. Cahyono dan Loen (2021) mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme anti-korupsi di 50 perusahaan publik, menemukan bahwa pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan elemen pencegahan, deteksi, dan respons memberikan hasil terbaik. Secara khusus, implementasi sistem whistleblowing yang efektif berkorelasi dengan penurunan signifikan dalam insiden fraud akuntansi.

Nguyen dan Le (2021) mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi teknologi blockchain untuk transaksi keuangan dan audit berkelanjutan (*continuous auditing*) menggunakan algoritma kecerdasan buatan menunjukkan potensi untuk mendeteksi anomali lebih cepat dan mengurangi peluang manipulasi. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa solusi teknologi harus didukung oleh kerangka etika yang kuat untuk menghindari risiko baru.

Dalam konteks organisasional, Wang et al. (2020) menemukan bahwa budaya etis yang diperkuat melalui kepemimpinan berprinsip dan sistem penghargaan yang selaras dengan nilai integritas berperan signifikan dalam mencegah perilaku koruptif. *Tone at the top*— perilaku etis yang dicontohkan oleh manajemen senior—terbukti menjadi prediktor kuat bagi iklim etis organisasi secara keseluruhan.

Peran lembaga pengawas mendapat perhatian khusus dalam studi Suryanto dan Thalassinou (2020) yang menganalisis dampak reformasi regulasi pasca-krisis finansial global. Mereka menemukan bahwa penguatan independensi regulator, peningkatan frekuensi dan kedalaman pemeriksaan, serta sanksi yang lebih berat bagi pelanggar berkontribusi pada penurunan praktik akuntansi agresif. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga dan konsistensi penegakan.

Pendidikan etika yang transformatif juga diidentifikasi sebagai komponen kunci pencegahan jangka panjang. Ibrahim dan Kamil (2023) mengusulkan pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan studi kasus, simulasi dilema etis, dan refleksi kritis untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa akuntansi dalam menghadapi tekanan etis. Pelatihan berkelanjutan untuk praktisi yang sudah berpengalaman juga terbukti efektif dalam memperkuat resistensi terhadap erosi etis gradual.

Kumar dan Yadav (2023) menyoroti pentingnya standarisasi internasional dan harmonisasi regulasi dalam era globalisasi ekonomi. Kesenjangan regulasi antar yurisdiksi menciptakan peluang untuk arbitrase etis—praktik memindahkan aktivitas ke yurisdiksi dengan standar etis atau pengawasan yang lebih lemah. Kolaborasi lintas-batas antara lembaga pengawas dan adopsi standar global menjadi semakin krusial untuk mengatasi tantangan ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Literature review ini mengungkapkan kompleksitas fenomena korupsi dalam akuntansi yang dipengaruhi oleh interaksi faktor internal individu, dinamika organisasional, dan konteks institusional yang lebih luas. Temuan-temuan menunjukkan bahwa korupsi dalam akuntansi bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan fenomena multi- dimensi yang memerlukan pendekatan holistik.

Faktor internal seperti defisiensi penalaran moral, tekanan finansial personal, dan orientasi nilai materialistik berinteraksi dengan faktor eksternal seperti budaya organisasi yang berorientasi hasil jangka pendek, kelemahan institusional, dan kompleksitas lingkungan bisnis. Interaksi ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelanggaran etis.

Dalam konteks etika bisnis, korupsi dalam akuntansi seringkali melibatkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Erosi gradual terhadap standar etis dan normalisasi deviasi melalui mekanisme rasionalisasi kognitif menjadi pola umum dalam kasus-kasus korupsi akuntansi.

Upaya pencegahan yang efektif mencakup pendekatan multi-level yang mengintegrasikan penguatan etika individu, reformasi budaya organisasi, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, penegakan regulasi yang konsisten, dan pendidikan etika yang transformatif. Peran lembaga pengawas menjadi semakin krusial dalam konteks globalisasi ekonomi dan digitalisasi yang menciptakan bentuk-bentuk baru kerentanan etis.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan sintesis literatur, beberapa rekomendasi diusulkan untuk memitigasi risiko korupsi dalam akuntansi:

1. Penguatan Pendidikan Etika: Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan etika secara substantif dalam kurikulum akuntansi, dengan penekanan pada pengembangan kapasitas penalaran moral dan resiliensi etis menghadapi tekanan real-world.
2. Reformasi Budaya Organisasi: Organisasi perlu mendefinisikan ulang model kesuksesan yang tidak hanya berbasis hasil finansial tetapi juga integritas proses. Sistem insentif harus diselaraskan dengan nilai-nilai etis dan kepemimpinan etis harus diperkuat.
3. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi: Implementasi teknologi seperti block-chain, analitik data, dan audit berkelanjutan dapat meningkatkan deteksi dini anomali dan memperkuat akuntabilitas.
4. Harmonisasi Regulasi Global: Kolaborasi internasional untuk mengurangi kesenjangan regulasi antar yurisdiksi dan mencegah arbitrase etis menjadi semakin penting dalam ekonomi global.

5. Perlindungan Whistleblower: Pengembangan mekanisme whistleblowing yang efektif dengan perlindungan memadai bagi pelapor dapat meningkatkan deteksi dini praktik koruptif.
6. Penelitian Interdisipliner: Diperlukan lebih banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif akuntansi, psikologi, sosiologi, dan etika untuk memahami kompleksitas korupsi dalam akuntansi secara lebih komprehensif.
7. Pengembangan Kode Etik Dinamis: Kode etik profesional perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi tantangan etis baru akibat transformasi digital dan kompleksitas bisnis kontemporer.
8. Penguatan Governance Profesional: Organisasi profesi akuntansi perlu memperkuat mekanisme peer review, continuing professional education dengan komponen etika yang kuat, dan supervisi kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.
- Ahmad, S., Saidin, S. Z., & Ahmi, A. (2021). Whistleblowing intentions among accounting professionals: Ethical dilemmas and moral intensity. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 265-281.
- Cahyono, D., & Loen, M. (2021). Effectiveness of anti-corruption mechanisms in Indonesian public companies: A multi-dimensional approach. *Journal of Business Ethics*, 169(3), 587-603.
- Gómez-Villegas, M., Trabalón-Ruiz, J., & Archel, P. (2022). Ethics education in accounting programs: Beyond compliance toward moral development. *Accounting Education*, 31(2), 205-226.
- Ibrahim, N., & Kamil, S. (2023). Ethical erosion in accounting profession: A longitudinal study of ethical decision-making. *Critical Perspectives on Accounting*, 87, 102487.
- Kumar, R., & Yadav, S. (2023). Ethical challenges in digital accounting: Navigating the gray zones. *Journal of Information Systems*, 37(2), 75-93.
- Nguyen, T. H., & Le, Q. T. (2021). Structural determinants of accounting corruption in emerging economies: A comparative analysis. *International Journal of Accounting*, 56(2), 2050019.
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., & Sriyana, J. (2022). Understanding accounting fraud in Indonesia: Institutional and cultural perspectives. *Pacific Accounting Review*, 34(1), 95-117.
- Suryanto, T., & Thalassinou, E. I. (2020). Regulatory reforms and their impact on accounting profession post-global financial crisis. *Journal of International Studies*, 13(3), 9-23.
- Syahrul, M., Hasibuan, R. P. S., & Lubis, A. F. (2020). Ethical violations in accounting profession: An analysis of disciplinary actions. *Asian Journal of Business Ethics*, 9(1), 35-54.
- Wang, L., Chen, J., Ren, Y., & Zhao, L. (2020). Institutional determinants of accounting ethics: A comparative study of five Asian countries. *Journal of Business Ethics*, 175(2), 391-411